

## **KESIMPULAN HASIL PERTEMUAN PEMBINAAN WILAYAH DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

**PADANG, 8 DESEMBER 2016**

---

1. Penerapan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dapat membantu Dinkes Provinsi memenuhi kewajiban SPM Bidang Kesehatan. Setiap pihak perlu melakukan identifikasi kesiapan penerapan program tersebut, dengan memperhatikan berbagai sumber daya yang dimiliki.
2. Melalui analisis tindak lanjut resolusi Rakerkesnas, telah diperoleh baseline untuk pemetaan situasi dan kondisi pada setiap subsistem sehingga dapat terpetakan kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan di tiap jenjang pemerintahan. Perlu dilakukan klarifikasi terhadap hasil analisis tersebut untuk menghindari kesimpulan yang kurang tepat. Hasil pemetaan ini dapat menjadi dasar pelaksanaan program/kegiatan untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah.
3. Implementasi pengelolaan obat satu pintu di rumah sakit ditujukan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan obat, sehingga mendukung tercapainya jaminan keamanan pasien. Dinkes dan rumah sakit perlu menyusun langkah-langkah penerapan yang sistematis, sehingga sumber daya yang dimiliki berdayaguna dalam tercapainya implementasi pengelolaan tersebut.
4. Perlu dilakukan sosialisasi regulasi kefarmasian dan alkes kepada pihak terkait sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada tenaga kefarmasian/masyarakat dan meminimalisir penyimpangan pengelolaan sediaan farmasi dan alkes.
5. Pengawasan pre market dan post market perlu dilakukan untuk menjamin fasyankes dan masyarakat menggunakan alat kesehatan dan PKRT yang aman, bermutu dan bermanfaat. Kemandirian produk alkes dalam negeri harus didukung agar industri alkes dalam negeri mampu memproduksi alkes sesuai standar dan berdaya saing.
6. Uji sampling obat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat. Dalam melaksanakan uji sampling dibutuhkan koordinasi yang baik antar institusi terkait. Setiap pihak perlu menyiapkan pelaksanaan pengadaan obat yang lebih baik di tahun 2017, terutama mengantisipasi masa akhir e-katalog 2016 di April 2017.
7. RKO hendaknya disusun dengan cermat sehingga menjadi acuan dalam produksi farmasi nasional dan lelang e-katalog.
8. Seluruh pihak yang terkait pada sistem produksi dan distribusi harus mengetahui, memahami dan mampu mengimplementasikan peraturan perUU terkait secara

komprehensif dan holistik. Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang produksi dan distribusi kefarmasian dalam rangka melindungi masyarakat dan mendorong daya saing usaha

9. Perlunya memanfaatkan alokasi DAK sebagai salah satu sumber pembiayaan urusan daerah yang sesuai prioritas nasional. Kebijakan *proposal-based* diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan kemanfaatan alokasi yang diberikan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin, instalasi farmasi yang menerapkan aplikasi logistik dan melakukan manajemen logistik sesuai standar.
10. Untuk memperkuat kapasitas Dinkes dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mencegah terulangnya kasus vaksin palsu, setiap institusi perlu memperkuat SOP pengelolaan logistik obat dan vaksin di masing-masing pihak. Selain itu, penguatan juga perlu dilakukan untuk pengawasan penerapan SOP tersebut, sehingga jaminan kualitas obat dan vaksin yang dikelolanya selalu terjaga.
11. Standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan Apotek) disusun untuk menjamin keselamatan pasien. Dinkes Provinsi/Kab/Kota harus melakukan pembinaan dalam implementasi standar tersebut sesuai kewenangannya
12. Telah dibentuk Unit Pencegahan Pungli di Kemenkes sesuai dengan Kepmenkes No 604/2016 yang bertugas melaksanakan pencegahan, penindakan dan yustisi terhadap pungli. Diharapkan provinsi dan kab/kota dapat melakukan pemetaan, pencegahan serta pengawasan terhadap proses pelayanan yang rawan pungli.